

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sejak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia, paradigma pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijadikan sebagai landasan utama dalam melaksanakan sistem desentralisasi agar tujuan dari otonomi daerah tercapai. Dengan diterapkannya kebijakan otonomi pemerintah pusat, seluruh pemerintah daerah di Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Selatan diberikan hak, wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Hamid, 2018). Tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya masalah yang terjadi dalam manajemen keuangan daerah yaitu, masih tingginya proporsi anggaran untuk belanja tidak langsung, seperti gaji pegawai, dari pada belanja langsung, baik berupa dana pelayanan publik atau dana investasi yang terkait langsung dengan tujuan organisasi, sehingga mengakibatkan rendahnya nilai kinerja pemerintah di mata masyarakat (Berti & Halmawati, 2021). Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dengan melihat tingkat efisiensi pemerintah daerah tersebut.

Menurut Carunia (2017:119) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya. Semakin besar kontribusi

Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Joice & Lukfiah (2018) PAD merupakan sumber keuangan yang dapat memberikan dampak yang lebih baik dibanding dengan sumber keuangan yang berasal dari luar PAD.

Pemerintah daerah di Sumatera Selatan memiliki ketergantungan yang tinggi dari dana transfer pusat yang dikelola Kementerian Keuangan untuk menggerakkan roda pemerintahan daerah. Jumlah dana transfer yang akan diterima daerah belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan berpotensi defisit. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Wilayah Sumatera Selatan mengatakan bahwa hanya dua dari 18 pemerintah daerah yang masuk kategori mandiri. Kepala Kanwil DJPb Sumatera Selatan mengatakan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kantong pemerintah daerah di Sumatera Selatan hanya sebesar 18,17 persen. Sementara rasio transfer dana dari pusat mencapai 81,83 persen. Hanya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang yang tercatat memiliki rasio PAD di atas rata-rata, yakni sebesar 40,36 persen dan 34 persen. Oleh karena itu indeks kemandirian fiskal (IKF) kedua pemerintah daerah tersebut di atas 0,5 yang masuk kategori mandiri 16 pemerintah daerah lainnya masih memiliki rasio PAD yang rendah, bahkan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara hanya memiliki rasio PAD 2,16 persen. Berikut perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan dari tahun 2016-2020.

**Tabel 1.1 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020.**

Tahun	Realisasi (Rp)
2016	2.546.177.544.348,66
2017	3.031.633.624.303,95
2018	3.528.011.711.183,34
2019	3.494.511.851.251,62
2020	3.375.100.984.842,03

Sumber : www.bpk.go.id. (Data diolah, 2022)

Melalui tabel 1.1, dapat dilihat realisasi Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Selatan belum stabil. Penurunan realisasi pada Pendapatan Asli Daerah disebabkan pandemi COVID-19 selama tahun 2020 yang mengakibatkan perekonomian masyarakat pada umumnya mengalami penurunan yang signifikan.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berupaya dalam meningkatkan realisasi belanja modalnya dengan tujuan untuk meningkatkan belanja pembangunan infrastruktur. Realisasi belanja modal sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) masih tergolong rendah. Hingga September 2021, realisasi belanja modal sejumlah pemerintah daerah bahkan masih ada yang dibawah 50 persen. Berdasarkan data Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel, ada delapan daerah yang realisasi belanjanya masih dibawah 50 persen. Adapun realisasi belanja modal Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini.

**Tabel 1.2 Data Realisasi Belanja Modal
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020**

Tahun	Realisasi (Rp)
2016	607.740.926.745,28
2017	1.377.382.678,423,59
2018	1.597.375.105.788,45
2019	1.606.219.507.432,26
2020	1.564.700.767.363,54

Sumber : www.bpk.go.id. (Data diolah, 2022)

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa realisasi belanja modal Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan penurunan pada tahun 2020. Minimnya serapan belanja tersebut sangat mempengaruhi situasi perekonomian daerah terutama pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain belanja modal, belanja pegawai juga merupakan segala bentuk pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk mendanai kompensasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk uang dan komoditas yang tersedia untuk pegawai negeri sipil. Belanja pegawai dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam melihat kemandirian suatu daerah (Ema & Agus, 2021). Semakin

kecil porsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai maka akan semakin besar porsi APBD yang dapat dialokasikan untuk belanja lainnya terkait dengan pelayanan masyarakat.

Di lansir dari (www.sumsel.inews.id) menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyorot anggaran belanja pegawai di Sumatera Selatan yang lebih besar dibanding belanja modal pada tahun anggaran 2021. Untuk belanja pegawai cenderung meningkat dari semula 19,33 persen atau senilai Rp 2,06 triliun menjadi 20,09 persen atau senilai Rp 2,15 triliun. Berikut ini data belanja pegawai Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020.

**Tabel 1.3 Data Realisasi Belanja Pegawai
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020**

Tahun	Realisasi (Rp)
2016	655.085.575.419,00
2017	1.458.701.975.762,00
2018	1.657.583.970.192,00
2019	1.757.169.664.436,00
2020	1.771.524.397.218,00

Sumber: www.bpk.go.id. (data diolah, 2022)

Melalui Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai di Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Hal ini membuktikan bahwa besarnya belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdampak langsung terhadap APBD pada pengurangan belanja modal yang sangat signifikan serta pengelolaan keuangan daerah yang masih belum efektif dan efisien.

Salah satu komponen yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan APBD baik ditingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari dana perimbangan. DAK sebagai salah satu sumber penerimaan dalam APBD turut memberikan kontribusi terhadap pengelolaan anggaran di daerah, oleh karena itu pemanfaatan sesuai dengan fungsinya. Dilansir dari (www.rmolsumsel.id/), Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Sumsel ke kas daerah hingga 30 September 2021 baru mencapai Rp623,89 miliar atau sebesar 32,78 persen dari total pagu anggaran sebesar

Rp1,90 triliun. Dari total dsana yang disalurkan, realisasi penyerapan DAK Fisik baru mencapai 25,55 persen atau sekitar Rp159,39 miliar. Sementara, sisa dana tersebut masih mengendap di kas daerah. Rendahnya capaian penyaluran dan penyerapan DAK Fisik tersebut disinyalir akibat lemahnya proses perencanaan yang dibuat pemerintah daerah. Berikut ini data Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020.

**Tabel 1.4 Data Realisasi Dana Alokasi Khusus
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020**

Tahun	Realisasi (Rp)
2016	148.180.327.539
2017	855.483.708,566
2018	2.171.297.782,400
2019	2.259.489.236,940
2020	2.233.802.709.438

Sumber: www.bpk.go.id. (data diolah, 2022)

Pada Tabel 1.4 di atas dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan respons Pemda terhadap pengelolaan DAK terbilang kurang. Sebagian pemda tidak terlalu proaktif dalam mengelola DAK yang diterimanya.

Angka pertumbuhan ekonomi secara teoritis menggambarkan peningkatan secara nyata jumlah barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah yang kemudian dapat menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah yang bersangkutan. PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian dan kesejahteraan suatu wilayah. Meskipun begitu, wilayah dengan nilai PDRB yang tinggi belum tentu mencerminkan kesejahteraan penduduknya secara nyata. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, dihitung dari PDRB ADHK. Pertumbuhan PDRB ADHK inilah yang dikenal juga sebagai laju pertumbuhan ekonomi (bpk.go.id).

Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Perekonomian Sumatera Selatan tahun 2020 diperkirakan tumbuh melambat dibandingkan tahun 2019. Adanya pandemi wabah COVID-19 menyebabkan perlambatan konsumsi rumah tangga, ekspor luar negeri, dan investasi yang disebabkan menurunnya

aktivitas ekonomi untuk mengurangi tingkat penyebaran wabah COVID-19. Namun demikian, peningkatan konsumsi pemerintah untuk penanggulangan dampak wabah COVID-19 dan peningkatan kapasitas produksi pada Lapangan Usaha industri pengolahan diperkirakan mampu menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan III-2019 (c-to-c) tumbuh 0,56 persen. Struktur PDRB Provinsi Sumatera Selatan menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan III-2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. (bpk.go.id).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Belanja Pegawai berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
6. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar dapat terfokus dalam pembahasan maka akan kami batasi pada variabel Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang berhubungan secara parsial maupun simultan dari tahun 2016 hingga 2020 di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Pegawai secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup di atas, manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu literatur untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai referensi bacaan tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi untuk para pengambil keputusan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.